

DPRD Trenggalek Terima Kunjungan Bawaslu, Sikapi Persiapan Pilkada 2024

Agus Riyanto - TRENGGALEK.NEWSPAPER.CO.ID

Jan 15, 2022 - 08:03



Suasana kunjungan kerja Bawaslu dan Komisionernya di ruang kerja Ketua DPRD Trenggalek

Trenggalek - Dalam rangka membangun sinergitas menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, unsu pimpinan DPRD Trenggalek menerima kunjungan kerja Bawaslu dan Komisionernya di ruang kerja Ketua DPRD, Jumat (14/1/2022).

Ketua DPRD Trenggalek, Samsul Anam mengatakan, pertemuannya dengan

Bawaslu dan Komisionernya dimaksudkan untuk mensikapi persiapan Pilkada 2024. Karena tahapan - tahapan itu akan dimulai akhir tahun 2022.

" Pada prinsipnya, kedatangan Bawaslu dan Komisionernya dalam rangka membahas Raperda dana hibah untuk penyelenggaraan pemilu. Dan mereka sudah menyampaikan pokok - pokok pikiran terkait anggaran dan persiapannya. Ini sedang di bahas oleh Panitia Khusus (Pansus) DPRD, " ucapnya.

Samsul menuturkan, selain membahas dana hibah, mereka juga menagajak berkolaborasi dalam mengedukasi masyarakat terkait hak dan kewajiban dalam pemilu, baik Pilkada maupun Pileg.

" Mereka menganggap jika pemahaman masyarakat masih kurang dalam menyikapi regulasi tentang peraturan KPU. Sehingga mereka mengajak berkolaborasi untuk memberikan edukasi agar tidak terjadi pelanggaran di Pemilu. Sehingga bisa menghasilkan pemimpin yang berkualitas. Pemimpin yang berkualitas itu dihasilkan dari demokrasi yang berkualitas pula, " imbuhnya.

Politisi senior dari PKB ini menyampaikan jika Bawaslu mengajukan estimasi anggaran sekitar Rp 18 miliar. Namun, itu harus didiskusikan terlebih dahulu, karena tahun 2024 juga ada Pilgup. Jadi harus dipilah - pilah komitmen antara Pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Pemerintah Daerah nanti seperti apa. " Jadi harus jelas dulu sharingnya seperti apa. Mana yang menjadi kewenangan provinsi dan mana yang menjadi kewenangan daerah, " kata pria yang sudah kali kelima menjadi legislator di DPRD Trenggalek.

Selanjutnya, dia merincikan, dana cadangan yang diajukan oleh KPU sebesar Rp 70 miliar, kemudian nanti Bawaslu berapa, karena masih ada instrumen lain, yakni pengamanan. " Dengan total nilai pengajuan itu, semua masih bisa berubah, " paparnya (ags).